

Efektifitas Bantuan Sosial Tunai dan Non Tunai Pada Program Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Di Provinsi Sulawesi Tenggara, 2020)

Siti Rogayah

Statistisi BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, siro_gaya@bps.go.id

Dini Amirul

Statistisi BPS Provinsi Sulawesi Tenggara

ABSTRAK, Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai bentuk bantuan bersyarat kepada rumah tangga sasaran untuk mengurangi persentase penduduk miskin di Indonesia. Terdapat dua jenis bantuan yang telah dijalankan, yaitu bantuan tunai seperti KKS, PKH, dan PIP dan bantuan non tunai seperti BPNT. Penelitian ini bertujuan untuk melihat efek dari empat bantuan tersebut dalam upaya pengentasan kemiskinan. Unit analisis pada studi kasus ini adalah rumah tangga sampel SUSENAS Maret 2020 yang dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Untuk menganalisis efek bantuan tersebut, penelitian ini menggunakan satu variabel terikat, yaitu status kemiskinan rumah tangga sampel yang terbagi dalam tiga kategori, dan empat variabel utama yaitu status penerima bantuan, serta sembilan variabel karakteristik rumah tangga sebagai variabel tambahan. Dengan menggunakan model multinomial logit, penelitian ini menemukan bahwa hanya bantuan KKS yang menurunkan peluang rumah tangga untuk dapat keluar dari garis kemiskinan pada rumah tangga yang terkategori miskin, sementara tiga bantuan lainnya (PKH, PIP, dan BPNT) tidak meningkatkan peluang untuk keluar dari garis kemiskinan.

Kata Kunci: kemiskinan, bantuan tunai, bantuan non tunai, multinomial logit.

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan kompleks yang menjadi tantangan pembangunan bagi banyak negara. Kemiskinan bukan hanya sekadar ketidakmampuan ekonomi suatu rumah tangga untuk dapat memenuhi kebutuhan makanan dan non-makanan [5], tetapi juga suatu kondisi yang membuat rumah tangga miskin tidak memiliki kemampuan untuk maju dan berkembang. Contohnya kesempatan untuk memperoleh akses pendidikan yang setara antara si kaya dan si miskin.

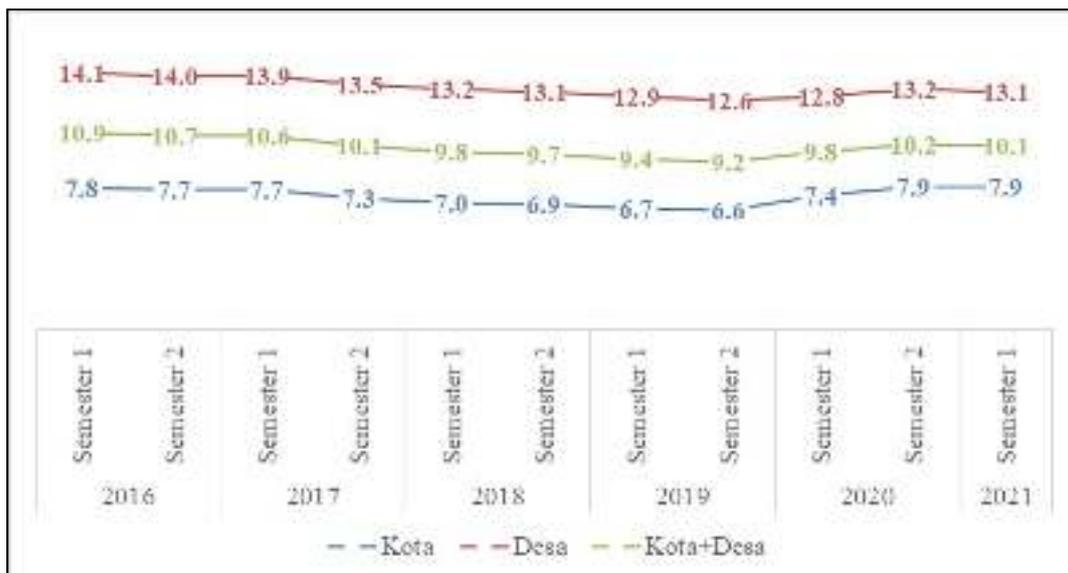
Berbagai upaya pengentasan kemiskinan telah dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Sebagaimana tercantum pada naskah siaran pers Kementerian PPN/Bappenas tahun 2018, terdapat setidaknya lima strategi, yaitu “pertama, meningkatkan efektivitas penurunan

kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi inklusif. Kedua, memantapkan kelompok menengah ke bawah, pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di luar pulau Jawa untuk memperkuat infrastruktur konektivitas yang menghubungkan antara pusat ekonomi dan wilayah penunjang sekaligus memperkuat pengembangan produk lokal dan jaringan rantai pasok produk ekspor terus dilaksanakan. Ketiga, reformasi anggaran subsidi. Keempat, peningkatan anggaran perlindungan sosial, dan kelima, perkuatan ekonomi domestik dan tata kelola impor.”

Melalui berbagai upaya tersebut, persentase penduduk miskin di Indonesia pernah menyentuh angka satu digit yang merupakan prestasi besar dalam upaya pengentasan kemiskinan. Secara rerata, persentase penduduk miskin di Indonesia mulai menyentuh angka di bawah 10% sejak semester pertama tahun 2018, dan terus mengalami penurunan dalam empat semester selanjutnya. Sementara itu, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan jauh lebih kecil daripada persentase penduduk miskin di daerah pedesaan (Gambar 1.1).

Upaya penurunan kemiskinan harus terus dilakukan mengingat angka kemiskinan di Indonesia kembali meningkat di awal tahun 2020. Kebijakan makro dan mikro yang tepat sasaran tentu sangat diperlukan. Secara makro, pemerintah terus berusaha untuk mendorong perekonomian secara inklusif. Pada kebijakan mikro, program perlindungan sosial seperti bantuan sosial dalam bentuk tunai maupun non tunai yang berbasis rumah tangga dinilai akan lebih cepat menurunkan angka kemiskinan.

Bantuan sosial dalam bentuk tunai maupun non tunai tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Program bantuan tunai, menurut Bank Dunia [4], dapat membawa sedikitnya tiga manfaat bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yaitu dapat membantu



Gambar 1.1 Persentase Penduduk Miskin menurut Wilayah, Indonesia, 2016 - 2021
 Sumber: BPS, 2021 (diolah)

menurunkan persentase rumah tangga miskin, meningkatkan nutrisi KPM, dan juga dapat meningkatkan tingkat partisipasi sekolah. Namun demikian, seiring dengan bertambahnya pendapatan dari bantuan tunai, peluang penggunaan dana yang tidak tepat tujuan, seperti peningkatan konsumsi rokok dan alkohol, dapat menjadi salah satu efek negatif dari bantuan tunai [7].

Berbeda dengan bantuan tunai yang lebih rentan menyebabkan efek negatif seperti memberikan peluang kebebasan kepada KPM dalam hal penggunaan dana bantuan, bantuan non tunai dinilai dapat membantu KPM, terutama dari kelompok miskin kronis, secara tepat sasaran untuk dapat memenuhi kebutuhan makanannya. Beberapa peneliti berpendapat bantuan non tunai dapat pula menyebabkan efek negatif terkait pemberdayaan usaha pertanian di daerah setempat apabila bahan makanan yang disalurkan berasal dari daerah yang berbeda.

Berdasarkan fenomena, permasalahan umum, dan permasalahan spesifik yang telah dijelaskan di atas, maka diperlukan kajian untuk melihat efektivitas antara bantuan tunai dan bantuan non tunai dalam upaya pengentasan kemiskinan. Selain itu, suatu penelitian yang melihat efek dari berbagai jenis kebijakan bantuan yang dilakukan pemerintah terhadap probabilitas suatu rumah tangga untuk keluar

dari lingkaran kemiskinan belum banyak dilakukan. Dengan menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Maret 2020, studi ini akan menganalisis pengaruh berbagai jenis bantuan, baik tunai dan non tunai, yang diterima rumah tangga terhadap probabilitasnya untuk dikategorikan sebagai rumah tangga miskin. Penelitian ini merupakan sebuah studi kasus di Provinsi Sulawesi Tenggara.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Untuk mengkaji efektifitas bantuan sosial tunai dan non tunai dalam upaya penurunan persentase penduduk miskin, penelitian ini akan memaparkan mekanisme efek langsung dan tidak langsung dari setiap program bantuan sosial yang bermuara pada pengentasan kemiskinan, berdasarkan berbagai penelitian sebelumnya. Selain itu, informasi tentang program-program bantuan sosial yang digunakan dalam penelitian ini juga akan dipaparkan secara singkat.

Terdapat berbagai jenis program perlindungan sosial yang dicanangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka penurunan level kemiskinan. Dalam penelitian ini, penulis membatasi penelitian pada empat jenis program bantuan bersyarat yang diimplementasikan secara nasional, yaitu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Program Keluarga

Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Ke empat jenis bantuan sosial yang diteliti telah mewakili jenis bantuan tunai dan jenis bantuan non tunai sebagai fokus utama penelitian ini. Penjelasan singkat terkait empat jenis program tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, KKS adalah kartu yang berisi uang bantuan khusus bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) kurang mampu, bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar PMKS. KKS merupakan bantuan tunai bersyarat, diperuntukkan bagi penyandang disabilitas, lansia, gelandangan dan pengemis, korban napza dan bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan [10].

Kedua, PKH adalah program yang telah dilaksanakan sejak tahun 2007 yang diperuntukkan bagi keluarga miskin, terutama keluarga miskin dengan ibu hamil dan anak usia sekolah. Serupa KKS, PKH merupakan program bantuan sosial bersyarat. PKH mendorong KPM untuk dapat memanfaatkan akses pelayanan sosial dasar, baik pelayanan kesehatan, pendidikan, bahkan pelayanan penduduk diabilitas dan lanjut usia. Keaktifan KPM dalam akses terhadap pelayanan sosial tersebut selanjutnya akan menjadi dasar nominal tambahan pemberian bantuan, selain bantuan tetap yang nilainya sama untuk setiap KPM [11].

Ketiga, PIP adalah program bantuan tunai yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (mendikbud) yang bertujuan untuk mencegah putus sekolah anggota keluarga miskin dan rentan miskin, dan menarik kembali peserta didik yang berhenti sekolah. PIP tidak hanya digunakan untuk sekolah formal, tetapi juga mencakup sekolah informal. Ketiga program bantuan di atas dikategorikan sebagai bantuan tunai dalam penelitian ini [9].

Keempat, BPNT merupakan bantuan non tunai yang diberikan kepada KPM setiap bulan. Program ini berupa uang elektronik yang hanya bisa dicairkan dengan membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan yang bekerja sama dengan kemensos. BPNT merupakan satu-satunya variabel yang mewakili bantuan non tunai yang dianalisis pada penelitian ini [12].

Bantuan tunai memiliki efek tidak langsung pada sukses dan tidaknya upaya penurunan persentase penduduk miskin, sebagaimana penjelasan yang diberikan oleh Saeed dan Hayat [15] sebagai berikut. Bantuan tunai dapat memberikan efek pendapatan (income effect) dalam pengelolaan pengeluaran makanan dan non makanan rumah tangga. KPM yang mengalami penambahan pendapatan dari uang tunai bantuan akan mengalami peningkatan pengeluaran. Apabila komoditas yang mengalami peningkatan, baik dalam kuantitas, kualitas, maupun keberagaman, adalah komoditas yang masuk dalam basket pengeluaran rumah tangga untuk pengkategorian miskin/tidak miskin KPM, maka kondisi ini akan meningkatkan peluang KPM untuk keluar dari status miskin.

Selain efek positif yang telah dijelaskan, di sisi lain juga terdapat kemungkinan penggunaan penambahan pendapatan yang tidak sesuai dengan tujuan pemberi bantuan, apabila komoditas yang mengalami peningkatan kuantitas adalah komoditas yang tidak masuk dalam basket komoditas penghitungan tingkat kemiskinan. Sebagai contoh adalah komoditas rokok, alcohol, dan judi. Simanjuntak dan Yusuke [16] memaparkan bahwa apabila barang tersebut dianggap sebagai barang normal (normal goods) oleh KPM, maka seiring dengan meningkatnya pendapatan akibat bantuan tunai, akan meningkatkan pengeluaran untuk barang-barang tersebut.

Berbeda dengan bantuan tunai yang masih rentan salah penggunaan, bantuan non tunai berupa BPNT yang diterapkan di Indonesia memberikan peluang peningkatan konsumsi makanan yang bermuara pada peningkatan pengeluaran per kapita. Dikarenakan diberikan dalam bentuk voucher belanja bahan makanan pokok, BPNT ini dinilai efektif hanya pada KPM sangat miskin, dan tidak memberikan efek keberagaman pengeluaran seperti halnya bantuan tunai. Bailey [3] menganalisa bahwa bantuan tunai secara tepat dapat digunakan untuk biaya pendidikan, sebagai bentuk investasi peningkatan kualitas SDM, bantuan non tunai berupa bahan makanan hanya memberikan efek spontan berupa peningkatan kuantitas konsumsi

bahan pangan dasar yang tidak bersifat pengentasan kemiskinan masa depan. Temuan ini mendukung bentuk pemberian bantuan tunai di Indonesia seperti PKH yang memiliki berbagai prasyarat keaktifan KPM dalam proses pencairan dana bantuan.

Dengan menggunakan berbagai tinjauan teori dan temuan yang dipaparkan di atas, penelitian ini menarik hipotesis bahwa berbagai bentuk bantuan yang diimplementasikan di Indonesia telah mengantisipasi berbagai kemungkinan penyimpangan tujuan, sehingga baik bantuan tunai maupun non tunai yang diberikan akan menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia.

3. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan satu variabel terikat berupa status kemiskinan rumah tangga sampel, dengan empat variabel bebas utama, dan sembilan variabel bebas tambahan. Variabel terikat diperoleh dari data pengeluaran per kapita (makanan dan non makanan) yang kemudian diurutkan dari nilai terkecil untuk dikelompokkan (menurut desil) dalam tiga kategori status kemiskinan rumah tangga. Rumah tangga yang masuk dalam desil pertama dan kedua dikategorikan sebagai rumah tangga miskin, rumah tangga yang masuk dalam desil ketiga dan keempat dikategorikan sebagai rumah tangga rentan miskin, sementara rumah tangga yang masuk dalam desil kelima dan seterusnya dikategorikan sebagai rumah tangga tidak miskin.

Untuk menganalisis pengaruh bantuan tunai dan non tunai terhadap status miskin rumah tangga, penelitian ini menggunakan data status penerima program bantuan KKS, PKH, PIP, dan BPNT. Selain empat variabel bebas utama tersebut, studi ini juga menambahkan beberapa variabel yang menggambarkan karakteristik kepala rumah tangga (krt), yaitu variabel jenis kelamin krt, kepemilikan pasangan krt yang diambil dari data status kawin krt, usia krt, kuadrat usia krt, ijazah tertinggi yang dimiliki oleh krt, dan status bekerja krt. Sebagaimana penjelasan pada tinjauan pustaka, penelitian ini juga menambahkan informasi keberadaan anggota rumah tangga (art) berjenis kelamin

perempuan yang berstatus bekerja serta variabel jumlah art dalam rumah tangga sampel.

Seluruh data yang diolah untuk analisis pada studi ini merupakan data mikro hasil pencacahan SUSENAS Maret 2020 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik. Lingkup penelitian meliputi wilayah kabupaten/kota dalam Provinsi Sulawesi Tenggara. Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi multinomial logit.

Penggunaan teknik analisis regresi multinomial logit didasarkan pada pernyataan Baulch, B. and Vu H.D. [6] yang menyatakan bahwa analisis regresi multinomial logit merupakan teknik yang paling sering digunakan diberbagai penelitian terkait kemiskinan. Selain itu, analisis regresi multinomial logit sangat relevan untuk jenis data variabel terikat (status kemiskinan) yang digunakan pada penelitian ini, yaitu data ordinal lebih dari dua kategori, dengan model sebagai berikut [18]:

$$G(z) = \exp(z) / [1 + \exp(z)] \quad (3.1)$$

$G(z)$ menggambarkan peluang yang nilainya diantara nol dan satu. Dengan jumlah variabel bebas lebih dari satu (multi) maka persamaan (1) di atas menjadi:

$$Prob(Y_i = k) = \frac{\sum_{k=1}^3 \sum_{j=1}^l \sum_{i=1}^{9164} e^{(\beta'_{kj} X_{ji})}}{1 + \sum_{k=1}^3 \sum_{j=1}^l \sum_{i=1}^{9164} e^{(\beta'_{kj} X_{ji})}} \quad (3.2)$$

Di mana:

Y_i : status kemiskinan rumah tangga ke- i

X_{ji} : variabel bebas ke- j pada rumah tangga ke- i

β'_{kj} : nilai estimasi parameter dari variabel bebas ke- j pada kategori status kemiskinan ke- j

i : nomor urut rumah tangga

j : variabel bebas

k : kategori status kemiskinan rumah tangga

4. PEMBAHASAN

Profile Data

Dalam penelitian ini, total sampel yang digunakan 9.164 rumah tangga yang mencakup seluruh sampel rumah tangga Susenas di wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara tahun 2020. Pengelompokan rumah tangga kedalam status kemiskinan berdasarkan desil sehingga terbagi

Tabel 4.1. Karakteristik Rumah Tangga menurut Status Kemiskinan

Variabel Bebas	Status Miskin			Grand Total
	Miskin	Rentan Miskin	Tidak Miskin	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jenis Kelamin KRT				
Laki-laki	79.57%	82.16%	80.58%	80.70%
Perempuan	20.43%	17.84%	19.42%	19.30%
Lapangan Usaha KRT				
Sektor Pertanian	50.19%	50.14%	64.38%	58.70%
Sektor NonPertanian	49.81%	49.86%	35.62%	41.30%
ART Perempuan Bekerja				
Ada	56.69%	59.25%	60.98%	59.78%
Tidak Ada	43.31%	40.75%	39.02%	40.22%
Status Pekerjaan KRT				
Bekerja	86.02%	88.60%	87.71%	87.55%
Tidak Bekerja	13.98%	11.40%	12.29%	12.45%
Usia Rata-rata KRT	48.50	48.41	48.21	48.31
Memiliki Pasangan (KRT)				
Ya	82.58%	82.38%	76.51%	78.90%
Tidak	17.42%	17.62%	23.49%	21.10%
Rata-rata Jumlah ART	5.21	4.51	3.57	4.08
Ijasah Tertinggi KRT				
SD Kebawah	63.90%	58.05%	42.29%	49.76%
SMP Sederajat	15.78%	15.60%	13.53%	14.39%
SMA Sederajat	17.37%	21.39%	27.18%	24.06%
Sarjana	2.95%	4.96%	17.00%	11.79%

Hasil olah data *Susenas 2020*

menjadi tiga kelompok. Dari hasil pengelompokan tersebut di temukan bahwa rata-rata pengeluaran perkapita kelompok yang memiliki status kemiskinan miskin dibawah garis kemiskinan yang telah ditetapkan oleh BPS di wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara.

Karakteristik rumah tangga dalam penelitian ini mayoritas kepala rumah tangganya berjenis kelamin laki-laki, bekerja, memiliki pasangan dan berumur rata-rata 48 tahun (tabel 1). Ijasah tertinggi, dimana variabel ini

memainkan peranan penting dalam penanggulangan kemiskinan juga memunculkan pola data yang sesuai dengan perkiraan [17]. Pada kelompok dengan status kemiskinan miskin, proporsi kepala rumah tangga dengan ijasah tertinggi sekolah dasar kebawah mendominasi total rumah tangga dalam kelompok tersebut (63.90%). Pola yang sama juga dapat dilihat pada kelompok lainnya, yakni rentan miskin dan tidak miskin, dimana KRT dengan ijasah SD kebawah lebih

Tabel 4.2 Jumlah Rumah Tangga Penerima Manfaat menurut Jenis Bantuan dan Status Kemiskinan

Status Miskin	Jumlah Rumah Tangga Penerima Manfaat			
	KKS	PKH	PIP	BPNT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Miskin	423	683	501	591
Rentan miskin	336	479	423	432
Tidak Miskin	553	681	573	662
Jumlah	1.312	1.843	1.497	1.685

Hasil olah data *Susenas 2020*

dari 40 persen dari total rumah tangga dari kedua kelompok tersebut. Hanya saja, proporsi dari ruta dengan ijasah tertinggi KRT SD ke bawah lebih kecil pada kelompok rentan miskin dan tidak miskin.

Dari sebaran data yang menjelaskan hubungan antara status miskin dari rumah tangga dengan jenis bantuan yang diterima (Tabel 4.2) dapat kita lihat secara sekilas bahwa jenis bantuan yang ada dalam penelitian ini tidak hanya terfokus pada satu kelompok saja, akan tetapi menyebar keseluruh kelompok. Bahkan, proporsi rumah tangga dengan status kemiskinan tidak miskin cukup besar jika dibandingkan dengan kelompok miskin dan rentan miskin. Padahal, salah satu tujuan program bantuan diatas adalah untuk membantu rumah tangga untuk keluar dari kemiskinan. Sehingga seharusnya proporsi rumah tangga dengan status miskin dan rentan miskin lebih besar dari yang lain. Hal ini dapat menjadi penanda awal bahwa program bantuan diatas belum dapat menurunkan kemiskinan seperti yang diharapkan.

Estimasi Parameter

Regresi Multinomial yang disajikan pada penelitian ini, memberikan pemahaman tentang faktor penarik dan pendorong rumah tangga untuk masuk dalam kelompok miskin, rentan miskin dan tidak miskin. Sekitar 11,2 persen variasi dalam model dapat dijelaskan oleh variabel karakteristik rumah tangga dan variabel jenis bantuan dalam penelitian kali ini. Berdasarkan hasilnya, setiap kelompok berdasarkan status miskin memiliki variabel signifikan yang hampir serupa. Dari semua variabel independen yang dimasukkan dalam model, tidak terdapat satu variabelpun yang tidak signifikan. Dalam model dengan status

kemiskinan 1 (miskin), semua variabel (15 variabel) yang dimasukkan signifikan. Hal serupa juga terjadi pada kelompok status miskin 2 (rentan miskin). Bila dilihat dari arah ekspektasi masing-masing variable bebas signifikan, untuk karakteristik rumah tangga, secara umum menunjukkan hasil yang sesuai ekspektasi. Sebaliknya, sebagian besar variabel bantuan menunjukkan arah yang berlawanan dari ekspektasi yang diharapkan. PKH, PIP dan BNPT menunjukkan arah yang positif dari kemiskinan. Sementara KKH, hanya menunjukkan arah negatif pada kelompok miskin dan menunjukkan arah positif pada kelompok rentan miskin.

Penelitian ini juga menghitung *marginal effect* dari model yang dibangun untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat (table 3). Pengelompokan tabel dibawah mengacu pada status miskin dari setiap rumah tangga (Miskin, Rentan, Tidak Miskin).

Dari sisi karakteristik rumah tangga, jika kepala rumah tangga berjenis kelamin perempuan maka peluang rumah tangga tersebut untuk masuk dalam kelompok miskin meningkat menjadi 16,67 poin persentase. Disisi lain, kepala rumah tangga wanita akan menurunkan peluang untuk tergabung dalam kelompok tidak miskin sebesar 24,5 poin persentase. Artinya, kepala rumah tangga perempuan kecil kemungkinannya untuk berada pada kelompok tidak miskin dibanding dengan rentan miskin dan miskin. Kepala rumah tangga yang tidak bekerja juga akan menurunkan peluang sebuah rumah tangga untuk tergabung dalam kelompok tidak miskin sebesar 3,0 poin persentase.

Hasil yang sama juga dapat dilihat dari variabel lainnya. Jumlah anggota rumah tangga

dan KRT yang bekerja disektor pertanian juga turut berperan menurunkan peluang rumah tangga untuk keluar dari kelompok yang berstatus miskin. Jika KRT bekerja disektor pertanian, peluang rumah tangga tersebut berada dalam kelompok miskin meningkat sebesar 8,5 poin persentase dan menurun peluangnya sebesar

16,7 poin persentase untuk masuk dalam kelompok tidak miskin. Selanjutnya, Rumah tangga yang memiliki rumah tangga lebih banyak, akan meningkatkan peluang rumah tangga tersebut untuk jatuh dalam kemiskinan sebesar 4,9 poin persentase.

Tabel 3. Hasil *Marginal Effect Regression* Status Kemiskinan

Variables	Status Kemiskinan		
	Miskin	Rentan Miskin	Tidak Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)
Karakteristik			
Jenis Kelamin KRT	0.16676	0.07918	-0.24594
Memiliki Pasangan (KRT)	-0.10131	-0.06148	0.16279
Usia KRT	-0.01517	-0.00916	0.02432
Kuadrtat Usia KRT	0.00015	0.00010	-0.00024
Ijasah Tertinggi KRT	-0.00178	-0.00227	0.00405
Status Pekerjaan KRT (Tidak Bekerja)	0.01172	0.01867	-0.03039
Lapangan Usaha KRT (Sektor Pertanian)	0.08565	0.08143	-0.16708
ART Perempuan Bekerja	-0.04336	-0.03645	0.07981
Jumlah ART	0.04930	0.03353	-0.08282
Jenis Bantuan			
Penerima KKS	-0.02418	0.04891	-0.02473
Penerima PKH	0.09727	0.01783	-0.11509
Penerima PIP	0.03328	0.05486	-0.08814
Penerima BPNT	0.01839	0.0027438*	-0.21138

Standard Errors in Parantheses * $p > 0.1$

Sumber : Hasil olah data *Susenas 2020*

Variabel perempuan bekerja memberikan efek yang berbeda terhadap kemiskinan dibandingkan dengan variabel independen yang telah dibahas sebelumnya. Jika sebuah rumah tangga memiliki art perempuan yang bekerja, maka kecil kemungkinannya untuk berada dalam kelompok dengan status kemiskinan miskin dan rentan miskin. Peluang untuk berada dalam kelompok miskin menurun sebesar 4,3 poin persentase. Sebaliknya, peluang untuk tergabung dalam kelompok tidak miskin akan meningkat sebesar

7,9 poin persentase. Hal ini dapat menjadi gambaran awal bahwa perempuan yang bekerja dapat membantu rumah tangga untuk keluar dari kemiskinan.

Rumah tangga dengan ijasah terakhir KRT lebih tinggi mengalami penurunan kemungkinan rata-rata menjadi miskin dan rentan miskin sebesar 0,1 poin dan 0,2 poin persentase. Sementara itu, perkiraan kemungkinan mereka untuk tidak miskin, secara rata-rata, meningkat sebesar 0,4 poin persentase. Hasil ini sejalan

dengan banyak penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa pendidikan berpengaruh positif dalam menurunkan kemiskinan [1], [2], [8], [14].

Dari sisi Jenis Bantuan, rumah tangga yang memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) memiliki peluang yang lebih besar untuk tergabung dalam kelompok rentan miskin dibandingkan dengan kelompok miskin dan tidak miskin. Peluang rumah tangga penerima manfaat KKS untuk berada dikelompok tidak miskin dan miskin menurun sebesar 2,4 poin persentase dibandingkan dengan kelompok rentan miskin. Jika hanya berfokus pada dua kelompok miskin dan rentan miskin saja, maka Penerima manfaat KKS akan cenderung memiliki peluang lebih kecil untuk berada dikelompok miskin. Begitu juga dengan variabel penerima pip, dimana peluang untuk tergabung dalam kelompok rentan miskin lebih besar dibanding lainnya.

Sebaliknya, hasil yang berbeda di perlihatkan oleh variabel Penerima PKH, dan Penerima BPNT. Sebagaimana dengan penjelasan diatas, jika kita hanya berfokus pada kelompok misin dan rentan miskin, maka rumah tangga yang menerima manfaat PKH, dan atau BPNT memiliki peluang yang lebih kecil untuk tergabung dalam kelompok “Rentan Miskin” dibandingkan “Miskin”.

Keseluruhan hasil diatas menjelaskan bahwa bantuan yang diharapkan dapat menjadi mesin utama dalam proses penurunan kemiskinan ternyata masih belum dapat memenuhi ekspektasi dari penelitian ini. Dari tiga jenis bantuan tunai hanya KKS yang menunjukkan hasil yang sesuai, dimana signifikan menurunkan kemiskinan pada kelompok rumah tangga dengan status miskin, sementara yang lain menunjukkan hasil yang sebaliknya. Begitupun dengan jenis bantuan non tunai (BPNT), hasilnya menunjukkan angka yang positif terhadap peninngkatan kemiskinan. Sebaran bantuan yang tidak terfokus pada hanya rumah tangga yang miskin dapat menjadi alasan mengapa hingga saat ini jenis bantuan yang digulirkan pemerintah masih belum efektif menurunkan kemiskinan.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa (1) hanya satu jenis bantuan yang signifikan menurunkan tingkat kemiskinan rumah tangga, yaitu bantuan tunai KKS. Sementara itu, (2) bantuan tunai PKH dan PIP, serta bantuan non tunai BPNT justru signifikan meningkatkan tingkat kemiskinan rumah tangga. Temuan pertama telah sesuai dengan hipotesis yang disusun dalam penelitian ini, akan tetapi temuan kedua dari penelitian menolak hipotesis yang ditetapkan. Karena keterbatasan dalam penelitian ini, penelitian lebih lanjut untuk mengetahui penyebab hingga bantuan tunai dan non-tunai tidak sesuai dengan tujuan penetapan bantuan, mutlak untuk dilakukan. Penelitian lanjutan dapat dilakukan baik dengan penelitian menggunakan kemiskinan dinamis, penelitian dalam cakupan wilayah dan sampel yang lebih luas, maupun penelitian dengan berbagai variabel yang lebih beragam.

6. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Amirul, Dini. (2020). *Transformasi Struktural dan Peluang Pekerja Pertanian Keluar dari Kemiskinan (Structural Transformation and Probability of Agricultural Labour's Escape From Poverty)*. Journal of International Development Vol.20-2: takushoku University
- [2] Alisjahbana, Armida, and Yusuf, Arief Anshory. (2003). *Kemiskinan Dinamis di Indonesia: panel data (Poverty Dynamics in Indonesia: Panel Data Evidence)*. Economic and Development Studies – Padjadjaran University. Working Paper No. 200303
- [3] Bailey, Sarah. (2013). *Efek dari bantuan tunai pada konsumsi makanan dalam situasi kemanusiaan: Tinjauan bukti (The Impact of cash transfers on food consumption in humanitarian settings: A review of evidence)*. Report prepared for the Canadian Foodgrains Bank.
- [4] Bank Dunia. (2019). Mengatasi kemiskinan, program bantuan tunai harus waspada terhadap dampak negative (*in fighting poverty, cash transfer programs*

- should be wary of negative spillovers*).
<https://www.worldbank.org/en/news/feature/2019/12/27/cash-transfer-programs-should-be-wary-of-negative-spillovers>.
Diakses pada tanggal 22 Agustus 2021
- [5] BPS. (2020). *Data dan informasi kemiskinan kabupaten/kota tahun 2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- [6] Baulch, B. and Vu H.D. (2011). *Poverty Dynamics in Vietnam, 2002 to 2006*. in Baulch, B. (Ed.), *Why Poverty Persists: Poverty dynamics in Asia and Africa*. Cheltenham, U.K, Edward Elgar, pp. 219-54
- [7] Evans, David K. dan Popova, Anna. (2014). *Bantuan tunai dan temptation goods: tinjauan bukti global (cash transfers and temptation goods: a review of global evidence)*. Policy Research working paper no.WPS 6886. Impact Evaluation series: no. IE 127 Washington, D.C.: World Bank Group
- [8] Jalan, Jyotsna, and Ravallion, Martin. (1998). *Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan Transien dan kronik (Determinants of Transient and Chronic Poverty: Evidence from Rural China)*. Working Paper No. 1936. The World Bank Research Development Group.
- [9] Kemdikbud. (2020). *Program Indonesia pintar*. <https://pip.kemdikbud.go.id/home>. Diakses tanggal 20 Agustus 2021
- [10] Kemensos. (2014). *Kartu keluarga sejahtera online bagi PMKS*. <https://intelresos.kemensos.go.id/new/?module=Program+Kks>. Diakses tanggal 20 Agustus 2021
- [11] Kemensos. (2018). *Apa itu program keluarga harapan*. <https://pkh.kemensos.go.id/?pg=tentangpkh-1>. Diakses tanggal 20 Agustus 2021
- [12] Kemensos. (2021). *Bantuan pangan non tunai*. <https://pusdatin.kemensos.go.id/bantuan-pangan-non-tunai-bpnt>. Diakses tanggal 20 Agustus 2021
- [13] Kementerian PPN/Bappenas. (2018). *Membedah angka kemiskinan terkini: Langkah strategis untuk terus turunkan kemiskinan (siaran pers)*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas
- [14] Rosyadi, Imron. (2017). *Identifikasi Faktor Penyebab Kemiskinan di Pedesaan dalam Perspektif Struktural*. The 6th University Research Colloquium 2017. Muhammadiyah Magelang University.
- [15] Saeed, Muhammad Kashif dan Hayat, Muhammad Azmat. (2020). *Pengaruh bantuan sosial tunai terhadap kemiskinan di Pakistam – studi kasus pada program bantuan pendapatan Benazir (The Impact of Social Cash Transfers on Poverty in Pakistan-A Case Study of Benazir Income Support Programme)*. MPRA Paper No. 99805
- [16] Simanjuntak, Bonar Partungkoan dan Yusuke, Jinnai. (2021). *Efek dari Conditional Cash Transfer pada Konsumsi dari Temptation GoodsBukti dari Program Keluarga Harapan di Indonesia (The Effect of Conditional Cash Transfer on Temptation Goods Consumption: Evidence from Program Keluarga Harapan in Indonesia)*. Jurnal PKS Vol 20 No 1: 31 - 40
- [17] Shafiul, Md. Azam dan Katsushi S. Imai. (2009). *Kerentanan dan Kemiskinan di Bangladesh (Vulnerability and poverty in Bangladesh)*. Chronic Poverty Research Centre No. 141.
- [18] Wooldridge, J.M. (2018). *Introductory econometrics: a modern approach*, 7th ed. Mason, USA: South-Western, Cengage Learning.